



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Juli 2023

Halaman: 1

Pimpinan dan Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Bicara Darurat Sampah

Antara Kebutuhan Anggaran, Sinergi dan Partisipasi Masyarakat

JANGAN TERULANG: Sejumlah sampah yang dibungkus plastik menumpuk di Jalan Brigjend Katamso Jogja. Sampah menumpuk saat TPA Regional Piyungan ditutup.

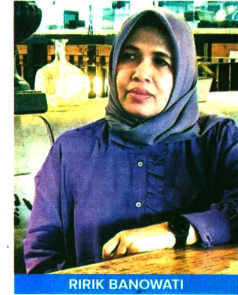


Ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan masih menjadi sorotan berbagai kalangan. Sebagai pandangan, kondisi Jogja saat ini sudah termasuk kategori darurat sampah. Butuh langkah yang pasti mengatasi kondisi tersebut.

"DARURAT sampah berkaitan pula dengan kebutuhan anggaran," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Hasan Widagdo. Dia juga menyoroti penanganan sampah yang akan melibatkan investor dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti disiapkan Pemprov DIY.

"Yang paling penting itu keputusan dari pemerintah daerah,

keadaan darurat atau bukan. Itu akan mempengaruhi skema penganggaran. Jika memang ada keputusan anggaran darurat maka anggaran itu peruntukannya juga harus jelas," ingatnya. Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Ririk Banowati menilai ditutupnya TPA Regional Piyungan berdampak pada penumpukan sampah harus segera diantisipasi



RIRIK BANOWATI

Antara Kebutuhan Anggaran, Sinergi dan Partisipasi Masyarakat

Sambungan dari hal 1

Dia mengapresiasi dengan mulai dibukanya TPA Regional Piyungan secara terbatas. Mulai Jumat (28/7) melayani pembuangan sampah dari Kota Jogja sebanyak 100 ton per hari. "Kami mendorong Pemkot Jogja menyelesaikan sampah-sampah yang ada di jalan," ujarnya.

Dia mengatakan, ada lima depo yang segera difungsikan kembali. Lalu diharapkan ditambah lagi pada minggu depan, agar sampah tidak berserakan. "Harapannya, minggu de-

pan itu depo atau TPS bisa ditambah lagi untuk dibuka," katanya.

Saat TPA Regional Piyungan ditutup, Ririk khawatir warga akan buang sampah ke sungai. Ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. "Masalahnya bisa semakin rumit," sesalnya.

Jauh sebelum adanya kebijakan menutup TPA Regional Piyungan, Ririk sudah mengingatkan perlunya penanganan khusus terkait sampah. Permasalahan sampah membutuhkan sinergi dan partisipasi dari masyarakat. Karena itu peran bank sampah dinilai

penting. Sebab, bank sampah tersebar di tingkat RW di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Mengutip Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012, Pasal 14 ayat (1) adanya insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pengurangan sampah. "Ada sebanyak 565 bank sampah yang berada di sejumlah RW se-Kota Yogyakarta. Namun masih ada 52 RW yang belum memilikinya," ungkapnya. Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono menekankan pentingnya koordinasi lintaswilayah.

Khususnya berhubungan dengan pengadaan lahan untuk tempat pembuangan sampah. Diakui, pengadaan lahan untuk TPA sampah cukup susah. Sebab, kerap diikuti dengan penolakan oleh warga di sekitarnya.

Senada dengan Hasan, soal kebutuhan anggaran, tidak perlu dikhawatirkan. Semua urusan yang sifatnya mendesak dan darurat, pasti didukung kalangan legislatif. "Jangan khawatir, nanti di APBD Perubahan bisa dimusyawarahkan. Intinya koordinasi lintas daerah harus berjalan," ujarnya. (lan/kus/hep/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005